

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa desa sebagai sebuah pemerintahan otonomi dengan diberikan hak – hak istimewa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat memimpin keselarasan pembangunan desa, serta kesejahteraan masyarakat desa (Saputra, Sopanah & Hasan. 2021). Pada Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pengertian diatas bahwa menempatkan desa sebagai organisasi yang memiliki demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat (Saputra Sopanah & Hasan. 2021).

Adanya penyesahan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula (Rizal, Fitri & Rantika. 2019). Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang diperuntukkan bagi desa dalam mewujudkan untuk membangun desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan APBDes dilaksanakan selama satu tahun anggaran dimana penyusunan APBDes telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

Peraturan Bupati Kab. Kupang No 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pedoman ini dibuat agar keuangan desa dilakukan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBDes dibahas oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, desa memiliki pendapatan asli desa, pendapatan transfer yang terdiri dari alokasi dana desa, dana

desa, bagian hasil dari pajak dan retribusi kabupaten/kota, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota.

Desa Oelpuah merupakan salah satu desa yang menerima anggaran pendapatan dari pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini adalah pendapatan Desa Oelpuah selama 3 tahun terakhir, yakni terhitung dari tahun 2022 s/d 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan pendapatan lain desa yang sah.

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa Oelpuah Tahun 2022 s/d 2024

Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)		
	Tahun Anggaran		
	2022	2023	2024
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	19.870.000,00	15.000.000,00
Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	19.870.000,00	15.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.207.134.406,00	1.395.331.570,00	1.464.273.130,00
Dana Desa	783.037.000,00	942.289.000,00	970.942.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.488.756,00	27.009.040,00	37.755.940,00
Alokasi Dana Desa	408.608.650,00	426.033.530,00	455.575.190,00
Pendapatan Lain – lain	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	1.209.634.406,00	1.415.201.570,00	1.479.273.130,00

Dari tabel 1.1 Dapat dilihat dari Pendapatan Asli Desa Oelpuah yang didapat dari hasil usaha desa selama 3 tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Desa tertinggi ditahun 2023 dengan total pendapatan sebesar Rp19.870.000,00. Selai itu, Pendapatan Asli Desa Oelpuah mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini dikarenakan aset desa mulai dikelola dan

diusahakan oleh BUMDes sehingga mendatangkan pendapatan bagi Desa Oelpuah berupa PAD.

Sedangkan Pendapatan Transfer Desa Oelpuah selama 3 terakhir umumnya bersumber dari Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari APBD. Dari tabel diatas terlihat bahwa Pendapatan Transfer Desa Oelpuah mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, baik itu dana yang bersumber mulai dari Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Desa.

Berikut dibawah ini rincian belanja desa Oelpuah dalam 3 (tiga) terakhir mulai dari tahun 2022 s/d 2024:

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Oelpuah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN	1.209.634.406,00	1.210.322.218,00	687.812,00
BELANJA			
<u>BIDANG PEENYYELENGGARAN PEMERINTAH DESA</u>	405.762.783,00	379.538.920,00	8.223.863,00
<u>Penyelenggaraan Belanja siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</u>	395.580.320,00	388.539.020,00	7.041.300,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
Belanja Pegawai	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.090.640,00	257.090.640,00	0,00
Belanja Pegawai	257.090.640,00	257.090.640,00	,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor PKPKD, dll)	16.770.000,00	16.778.700,00	8.700,00
Belanja Barang dan Jasa	16.770.000,00	16.778.700,00	8.700,00

Penyediaan Tunjangan BPD	40.200.000,00	36.000.000,00	4.200.000,00
Belanja Pegawai	40.200.000,00	36.000.000,00	4.200.000,00
Penyediaan Operasional BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.400.000,00	44.550.000,00	2.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	44.550.000,00	2.850.000,00
<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan</u>	<u>10.182.463,00</u>	<u>8.999.900,00</u>	<u>1.182.563,00</u>
Penyelenggaraan Musyawara Desa dan Lainnya (Musdus, Rembung Desa Non Reguler)	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMJDesa/RKPDDesa DII)	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.499.900,00	1.499.900,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	1.499.900,00	1.499.900,00	0,00
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayaan & BPD	1.182.563,00	0,00	1.182.563,00
Belanja Barang dan Jasa	1.182.563,00	0,00	1.182.563,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	318.358.855,00	306.724.400,00	11.634.455,00
<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>33.900.000,00</u>	<u>2.100.000,00</u>
Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasa Non Formal	36.000.000,00	33.900.000,00	2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	33.900.000,00	2.100.000,00
<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>110.135.857,00</u>	<u>101.284.900,00</u>	<u>8.850.957,00</u>
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, Insentif, Kb, dsb)	62.400.000,00	57.675.000,00	4.725.000,00
Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	57.675.000,00	4.725.000,00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan Kls Bumil, Lansia, Insentif)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.275.857,00	3.149.900,00	125.957,00
Belanja Barang dan Jasa	3.275.857,00	3.149.900,00	125.957,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana	7.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	24.960.000,00	24.960.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	24.960.000,00	24.960.000,00	0,00
<u>Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang</u>	110.257.500,00	109.574.500,00	683.000,00
Pemeliharaan Jalan Desa	110.257.500,00	109.574.500,00	683.000,00
Belanja Modal	110.257.500,00	109.574.500,00	683.000,00
<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	59.965.000,00	59.965.000,00	0,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	59.965.000,00	59.965.000,00	0,00
Belanja Modal	59.965.000,00	59.965.000,00	0,00
<u>Sub Bidang Perhubungan, dan Komunikasi</u>	2.000.498,00	2.000.000,00	498,00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.000.498,00	2.000.000,00	498,00
Belanja Barang dan Jasa	2.000.498,00	2.000.000,00	498,00
<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	12.295.344,00	12.295.000,00	344.000,00
<u>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum</u>	4.745.344,00	4.745.000,00	344.000,00
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.745.344,00	4.745.000,00	344.000,00
Belanja Barang & Jasa	4.745.344,00	4.745.000,00	344.000,00
<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, dll)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00
Pembinaan Lembaga Adat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00

Pembinaan PKK	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	78.763.000,00	78.593.000,00	170.000,00
<u>Sub Bidang Pertanian & Peternakan</u>	78.763.000,00	78.593.000,00	170.000,00
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengolahan	45.213.000,00	45.213.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	18.428.667,00	18.428.667,00	0,00
Belanja Modal	26.784.333,00	26.784.333,00	0,00
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian & Peternakan	33.550.000,00	33.580.000,00	170.000,00
Belanja Barang & Jasa	33.550.000,00	33.580.000,00	170.000,00
<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK</u>	414.404.210,00	414.250.442,00	153.768,00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	61.604.210,00	61.450.442,00	153.768,00
Kegiatan Penanggulangan Bencana	61.604.210,00	61.450.442,00	153.768,00
Belanja Tak Terduga	61.604.210,00	61.450.442,00	153.768,00
<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
Penanganan Keadaan Mendesak	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga	352.800.000,00	352.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.229.584.192,00	1.209.401.762,00	20.182.430,00
SURPLUS (DEFISIT)	(19.949.786,00)	920.456,00	(20.870.242,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	19.949.786,00	19.949.786,00	0,00
SILPA Tahun Sebelumnya	19.949.786,00	19.949.786,00	0,00
SILPA Tahun Sebelumnya	19.949.786,00	19.949.786,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	949.786,00	949.786,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	20.870.242,00	(20.870.242,00)

Sumber data: Laporan Realisasi Pelaksanaan ABDes Desa Oelpuah Tahun 2022

Tabel 1.2 merupakan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Oelpuah Tahun 2022 dengan jumlah pendapatan sebesar **Rp1.209.634.406,00** yang diterima Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer. Dan jumlah Anggaran Belanja Desa sebesar **Rp1.229.584.192** jumlah anggaran belanja tersebut terdiri dari: Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oelpuah sebesar **Rp405.762.783**, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar **Rp318.358.855**, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar **Rp12.295.344**, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar **Rp78.763.000**, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak sebesar **Rp414.404.210**.

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Oelpuah Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN	1.415.201.570,00	1.416.363.282,00	1.161.712,00
BELANJA			
<u>BIDANG PEENYYELENGGARAN PEMERINTAH DESA</u>	452.768.723,00	445.509.920,00	7.258.805,00
<u>Penyelenggaraan Belanja siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</u>	433.028.723,00	425.769.920,00	7.258.805,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
Belanja Pegawai	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.090.640,00	251.024.040,00	6.066.600,00
Belanja Pegawai	257.090.640,00	251.024.040,00	6.066.600,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor PKPKD, dll)	34.840.773,00	33.849.200,00	991.573,00
Belanja Barang dan Jasa	34.840.773,00	33.849.200,00	991.573,00
Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Penyediaan Operasional BPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.200.000,00	46.000.000,00	200.000,00
Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	46.000.000,00	200.000,00

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	24.777.630,00	24.777.000,00	630,00
Belanja Barang & Jasa	4.777.630,00	24.777.000,00	630,00
<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
Penyusunan, Pendataan, & Pemutakhiran Profil Desa **)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan</u>	<u>13.240.000,00</u>	<u>13.240.000,00</u>	<u>0,00</u>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMJDesa/RKPDesa Dll)	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayaan & BPD	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>529.866.500,00</u>	<u>529.565.876,00</u>	<u>300.634,00</u>
Sub Bidang Pendidikan	41.805.000,00	41.805.000,00	0,00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasa Non Formal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Penyuluhan & Pelatihan Bagi Masyarakat	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00
<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>155.940.000,00</u>	<u>155.940.000,00</u>	<u>0,00</u>
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, Insentif, Kb, dsb)	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	68.100.000,00	68.100.000,00	<u>0,00</u>

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan Kls Bumil, Lansia, Insentif)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	22.236.600,00	22.236.600,00	0,00
Belanja Modal	7.763.400,00	7.763.400,00	0,00
<u>Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang</u>	202.500.000,00	202.500.000,00	0,0
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	22.500.000,00	22.500.000,00	0,0
Belanja Barang & Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,0
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	10.821.000,00	10.821.000,00	0,00
Belanja Modal	169.179.000,00	169.179.000,00	0,00
<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	127.621.500,00	127.320.876,00	300.624,00
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Pemeliharaan Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	14.870.000,00	14.870.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Belanja Modal	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	59.965.000,00	59.965.000,00	0,00
Belanja Modal	59.965.000,00	59.965.000,00	0,00
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	32.786.500,00	32.785.876,00	624,00
Belanja Modal	32.786.500,00	32.785.876,00	624,00
<u>Sub Bidang Perhubungan, dan Komunikasi</u>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	49.053.194,00	49.052.000,00	1.194,00
<u>Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan</u>	2.054.994,00	2.054.000,00	994,00

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, & Keagamaan (HUT RI)	2.054.994,00	2.054.000,00	994,00
Belanja Barang & Jasa	2.054.994,00	2.054.000,00	994,00
<u>Sub Bidang Kepemudaan & Olahraga</u>	<u>39.248.200,00</u>	<u>29.248.000,00</u>	<u>200,00</u>
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	39.248.200,00	39.248.000,00	200,00
Belanja Barang & Jasa	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00
Belanja Modal	35.623.200,00	35.623.000,00	200,00
<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>7.750.000,00</u>	<u>7.750.000,00</u>	<u>0,00</u>
Pembinaan Lembaga Adat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Pembinaan PKK	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>174.020.895,00</u>	<u>161.186.201,00</u>	<u>12.834.694,00</u>
<u>Sub Bidang Pertanian & Peternakan</u>	<u>146.880.000,00</u>	<u>134.045.701,00</u>	<u>12.834.299,00</u>
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengolahan/Penggilingan)	49.800.000,00	36.965.701,00	12.834.299,00
Belanja Barang & Jasa	49.800.000,00	36.965.701,00	12.834.299,00
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	12.566.000,00	12.566.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	8.696.000,00	8.696.000,00	0,00
Belanja Modal	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	73.039.000,00	73.039.000,00	0,00
<u>Belanja Modal</u>	73.039.000,00	73.039.000,00	0,00
<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
Pembangunan Saran Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>2.140.895,00</u>	<u>2.140.500,00</u>	<u>395,00</u>
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang Dilaksanakan oleh Pemdes)	2.140.895,00	2.140.500,00	395,00
Belanja Barang & Jasa	2.140.895,00	2.140.500,00	395,00

<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK</u>	<u>230.362.500,00</u>	<u>222.255.000,00</u>	<u>8.107.500,00</u>
Sub Bidang Keadaan darurat	28.762.500,00	20.655.000,00	8.107.500,00
Penanganan Keadaan Darurat	28.762.500,00	20.655.000,00	8.107.500,00
Belanja Tak Terduga	28.762.500,00	20.655.000,00	8.107.500,00
<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>201.600.000,00</u>	<u>201.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
Penanganan Keadaan Mendesak	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.436.071.812,0 0	1.407.568.997,0 0	28.502.815,00
SURPLUS (DEFISIT)	(20.870.242,00)	8.794.285,00	(29.664.527,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	20.870.242,00	20.870.242,00	0,00
SILPA Tahun Sebelumnya	20.870.242,00	20.870.242,00	0,00
SILPA Tahun Sebelumnya	20.870.242,00	20.870.242,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	20.870.242,00	20.870.242,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	29.664.527,00	(29.664.527,00)

Sumber data: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Oelpuah Tahun 2023

Tabel 1.3 Merupakan Tabel Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Oelpuah tahun 2023 dengan jumlah pendapatan sebesar **Rp1.415.201.570**, jumlah pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer. Jumlah untuk anggaran belanja desa Oelpuah sebesar **Rp1.436.071.812**, jumlah belanja tersebut terdiri dari: Bidang Penanggulangan Pemerintah Desa sebesar **Rp452.768.723**, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar **Rp529.866.500**, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar **Rp49.053.194**, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar **Rp174.020.895**, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak sebesar **Rp230.362.500**.

Tabel 1.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Oelpuah Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN	1.479.273.130,00	1.466.419.132,00	12.853.998,00
BELANJA			
<u>BIDANG PEENYYELENGGARAN PEMERINTAH DESA</u>	<u>475.016.998,00</u>	<u>4559.240.412,00</u>	<u>15.776.586,00</u>
<u>Penyelenggaraan Belanja siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</u>	<u>444.144.33000</u>	<u>430.868.412,00</u>	<u>13.275.918,00</u>
Penyediaan Penghasilan Ttetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.119.680,00	30.119.680,00	5.000.000,00
Belanja Pegawai	35.119.680,00	30.119.680,00	5.000.000,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.868.640,00	232.824.240,00	4.044.400,00
Belanja Pegawai	236.868.640,00	232.824.240,00	4.044.400,00
Penyediaan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.557.600,00	1.557.600,00	0,00
Belanja Pegawai	1.557.600,00	1.557.600,00	0,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor PKPKD, dll)	59.045.000,00	59.342.892,00	297.892,00
Belanja Barang dan Jasa	59.045.000,00	59.342.892,00	297.892,00
Penyediaan Tunjangan BPD	37.050.000,00	32.550.000,00	4.500.000,00
Belanja Pegawai	37.050.000,00	32.550.000,00	4.500.000,00
Penyediaan Operasional BPD (Rapat,ATK, Makan Minum,Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.390.000,00	5.901.000,00	29.000,00
Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	5.901.000,00	29.000,00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	24.973.410,00	24.973.000,00	410,00
Belanja Barang & Jasa	19.973.410,00	19.973.000,00	410,00
Belanja Tak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa</u>	<u>5.325.000,00</u>	<u>5.325.000,00</u>	<u>0,00</u>
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00

<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan</u>	<u>25.547.668,00</u>	<u>23.047.000,00</u>	<u>2.500.668,00</u>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.765.000,00	9.765.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	9.765.000,00	9.765.000,00	0,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.782.668,00	5.782.000,00	668,00
Belanja Barang & Jasa	5.782.668,00	5.782.000,00	668,00
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayaan & BPD	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>500.380.038,00</u>	<u>490.325.000,00</u>	<u>10.055.038,00</u>
Sub Bidang Pendidikan	23.125.000,00	21.470.000,00	1.655.000,00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasa Non Formal	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	2.255.000,00	2.220.000,00	35.000,00
Belanja Barang & Jasa	2.255.000,00	2.220.000,00	35.000,00
Penyuluhan & Pelatihan Bagi Masyarakat	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
Belanja Barang & Jasa	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>140.956.000,00</u>	<u>137.111.000,00</u>	<u>5.845.000,00</u>
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (Obat, Insentif, Kb, dsb)	61.200.000,00	60.950.000,00	250.000,00
Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	60.950.000,00	250.000,00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan Kls Bumil, Lansia, Insentif)	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
Penyuluhan & Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.906.000,00	2.791.000,00	1.115.000,00
Belanja Barang & Jasa	3.906.000,00	2.791.000,00	1.115.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	14.850.000,00	10.370.000,00	4.400.000,00
Belanja Barang & Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
Belanja Modal	14.350.000,00	9.870.000,00	4.480.000,00

<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>327.317.800,00</u>	<u>327.764.000,00</u>	<u>2.553.800,00</u>
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	67.946.000,00	67.899.000,00	47.000,00
Belanja Modal	67.946.000,00	67.899.000,00	47.000,00
Pemeliharaan Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	259.865.000,00	259.865.000,00	0,00
Belanja Modal	259.865.000,00	259.865.000,00	0,00
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	2.506.800,00	0,00	2.506.800,00
Belanja Modal	2.506.800,00	0,00	2.506.800,00
<u>Sub Bidang Perhubungan, dan Komunikasi</u>	<u>3.981.238,00</u>	<u>3.980.000,00</u>	<u>0,00</u>
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	3.981.238,00	3.980.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.981.238,00	3.980.000,00	0,00
<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>59.746.212,00</u>	<u>50.300.000,00</u>	<u>9.446.212,00</u>
<u>Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan</u>	<u>11.446.212,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>9.446.212,00</u>
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, & Keagamaan (HUT RI)	11.446.212,00	2.000.000,00	9.446.212,00
Belanja Barang & Jasa	11.446.212,00	2.000.000,00	9.446.212,00
<u>Sub Bidang Kepemudaan & Olahraga</u>	<u>38.000.000,00</u>	<u>38.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	625.000,00	625.000,00	0,00
Belanja Modal	37.375.000,00	37.375.000,00	0,00
<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>10.300.000,00</u>	<u>10.300.000,00</u>	<u>0,00</u>
Pembinaan Lembaga Adat	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
Pembinaan PKK	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>351.394.409,00</u>	<u>303.652.196,00</u>	<u>47.742.213,00</u>
<u>Sub Bidang Pertanian & Peternakan</u>	<u>326.394.409,00</u>	<u>290.152.196,00</u>	<u>36.242.213,00</u>
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengolahan/Penggilingan)	71.570.000,00	35.400.000,00	36.170.000,00
Belanja Barang & Jasa	71.570.000,00	35.400.000,00	36.170.000,00

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	37.340.000,00	37.340.000,00	0,00
Belanja Barang & Jasa	21.165.000,00	21.165.000,00	0,00
Belanja Modal	16.175.000,00	16.175.000,00	0,00
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	217.484.409,00	217.412.196,00	72.213,00
Belanja Modal	217.484.409,00	217.412.196,00	72.213,00
<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah</u>	25.000.000,00	13.500.000,00	11.500.000,00
Pembangunan Saran Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi	25.000.000,00	13.500.000,00	11.500.000,00
Belanja Barang & Jasa	25.000.000,00	13.500.000,00	11.500.000,00
<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK</u>	<u>122.400.000,00</u>	<u>122.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>122.400.000,00</u>	<u>122.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.508.937.657,00	1.425.917.608,00	83.020.049,00
SURPLUS (DEFISIT)	(29.664.527,00)	40.501.524,00	(70.166.051,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	29.664.527,00	29.664.527,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	29.664.527,00	29.664.527,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	70.166.051,00	(70.166.051,00)

Sumber data: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Oelpuah Tahun 2024

Tabel 1.4 Menunjukkan Bahwa jumlah pendapatan Desa Oelpuah yang di dapat dari jumlah Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Desa sebesar **Rp1.479.273.130**, dan jumlah Anggaran Belanja Desa Oelpuah sebsar **Rp1.508.937.657**, dengan rincian belanja sebagai berikut: Bidang Penyelenggara Pemerintah sebesar **Rp475.016.998**, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar **Rp500.380.038**, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar **Rp59.746.212**, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar **Rp351.394.409**, dan

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak sebesar **Rp122.400.000.**

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar – benar dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut (Mokalu, Gosal & Sampe. 2019). Berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *Good Govemance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang wewenang meminta pertanggungjawaban. Media pertanggungjawaban akuntabiliitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek – aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung

maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Mokalu, Gosal & Sampe. 2019).

Berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes ini didukung karena adanya penelitian terdahulu sehingga hal tersebut menyakinkan peneliti. Disini peneliti mengambil tiga (3) jurnal penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan pengembangan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Sopanah & Hasan (2021) di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dengkol dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan baik yaitu akuntabel, transparan, dan adanya partisipasi dari masyarakat. Pengelolaan APBDes di Desa Dengkol diketahui bahwa tahapan – tahapan pengelolaan APBDes dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang No. 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa namun masih terdapat perlunya pembinaan dalam penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat publik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizal, Fitri & Rantika (2019), di Desa atau yang selanjutnya disebut Nagari. Nagari Balimbing kecamatan Rambatan Kabupaten tanah Datar, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Balimbing kecamatan Rambatan Kabupaten tanah Datar sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APB nagari. Secara umum ada

beberapa indikator dari kriteria akuntabel dan transparan yang belum terpenuhi oleh pemerintah nagari Balimbing. Kemudian penelitian yang dilakukan Faradhiba dan Diana (2018) menjelaskan hasil penelitiannya yaitu dimana terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yakni dalam faktor pendukung terdapat pemerintah desa, partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber dana. Dalam pengelolaan APBDes yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana.

Berbeda dengan penelitian terdahulu diatas yang telah disebutkan maka, menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul “ penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes “. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bedanya objek penelitian yaitu objek penelitian berada di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang “.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian maka persoalan penelitian adalah bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam mengelola APBDes yang sesuai dengan standar yang berlaku serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya serta memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya di harapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pembaca.